

Optimalisasi Program Bojonegoro Kampung Pesilat Untuk Menciptakan Kondusifitas Kamtibmas Di Wilayah Bojonegoro

Optimization Of The Bojonegoro Kampung Pesilat Program To Create A Conducive Security And Order Environment In The Bojonegoro Region

ROGIB TRIYANTO

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286
Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: Rogib.triyanto-2024@pasca.unair.ac.id

ABSTRAK

Efektivitas Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mereduksi konflik antarperguruan pencak silat di wilayah Polres Bojonegoro terbukti signifikan, dengan penurunan insiden konflik dari 15-20 menjadi 3-5 per tahun. Keberhasilan program ini terletak pada manajemen kolaboratif yang mencakup pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti sosialisasi, pelibatan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas, serta pengawasan dan dukungan anggaran. Optimalisasi BKP memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan seni dan budaya melalui konsep Art Policing. Ini mencakup kegiatan seperti festival, acara keagamaan, dan pelatihan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi dialog dan kolaborasi. Peran Bhabinkamtibmas, dukungan anggaran, dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan program. Dengan strategi yang komprehensif, BKP dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Bojonegoro.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Bojonegoro Kampung Pesilat, Konflik*

ABSTRACT

The effectiveness of the Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) Program in reducing conflicts between pencak silat schools in the jurisdiction of Polres Bojonegoro has proven significant, with a decrease in conflict incidents from 15-20 to 3-5 per year. The program's success lies in collaborative management that includes trust building, commitment, shared understanding, and intermediate outcomes. However, there are several aspects that need improvement, such as outreach, community involvement, the role of Bhabinkamtibmas, as well as supervision and budget support. Optimizing BKP requires a holistic approach that integrates arts and culture through the concept of Art Policing. This includes activities such as festivals, religious events, and leadership training to create a conducive environment for dialogue and collaboration. The role of Bhabinkamtibmas, budget support, and effective supervision are crucial for the sustainability of the program. With a comprehensive strategy, BKP can continue to grow and have a greater positive impact on maintaining social stability and security in Bojonegoro.

Keywords: *Optimization, Bojonegoro Kampung Pesilat, Conflict*

1. Pendahuluan

Konflik sosial adalah fenomena yang wajar terjadi dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan budaya. Konflik ini sering muncul dalam kehidupan demokrasi yang melibatkan individu, masyarakat, dan negara, di mana ketiganya sering berada dalam konflik kepentingan. Meskipun ketiga elemen ini harus seimbang untuk mencapai kesejahteraan, konflik yang timbul dari perbedaan dan benturan kepentingan sering kali menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan dan korban jiwa (Suparlan, 1986).

Konflik horizontal antara organisasi masyarakat, khususnya perguruan pencak silat, sering dipicu oleh kebanggaan dan fanatisme kelompok. Meskipun pencak silat awalnya bertujuan untuk melestarikan tradisi dan memupuk persaudaraan, persaingan antar perguruan telah memicu rivalitas dan kekerasan. Konflik ini tidak hanya merusak hubungan antar perguruan, tetapi juga mencemari citra pencak silat sebagai seni bela diri yang seharusnya mempromosikan perdamaian dan harmoni. Konflik antar perguruan pencak silat di Jawa Timur telah menjadi masalah serius, dengan banyaknya insiden kekerasan yang berujung pada korban luka dan tewas (Yulianto, 2018).

Sebagai upaya untuk mengatasi konflik ini, Polres Bojonegoro membentuk Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dengan pendekatan Pemolisian Masyarakat berbasis seni budaya (art policing). BKP bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar perguruan silat, meminimalisir konflik, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keamanan. Meskipun demikian, konflik antar perguruan pencak silat masih sering terjadi meskipun BKP telah dibentuk, menunjukkan bahwa harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Data menunjukkan bahwa insiden kekerasan yang melibatkan perguruan pencak silat masih tinggi, dengan tren peningkatan kasus setiap tahunnya, menandakan perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas program BKP.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah efektivitas peran BKP dalam mereduksi konflik horizontal antar perguruan pencak silat di wilayah Hukum Polres Bojonegoro ?
- Bagaimanakah optimalisasi peran BKP dalam mereduksi konflik horizontal antar perguruan pencak silat di wilayah Hukum Polres Bojonegoro ?

3. Kajian Pustaka

3.1. Konsep Pemolisian

Polmas merupakan implementasi *community policing* dalam penyelenggaraan tugas Polri. Polmas dalam implementasinya sering disamakan dengan model-model pemolisian seperti sitkamtibmas, binmastral, binmas dan sebagainya. Namun, sebenarnya berbeda bahkan bertentangan; ada kemiripan, tetapi esensinya berbeda (Dwilaksana, 2020). *Community Policing Consortium* mengatakan bahwa pemolisian masyarakat terdiri dari dua komponen utama yaitu kemitraan dan pemecahan masalah (Jatmiko, 2022).

3.2. Konsep Art Policing

Image Polisi bekerja secara umum, pemolisiannya merupakan penjabaran tindakan : preemtif preventif maupun dengan represif sebagai penegak hukum. Kewenangan upaya paksa yang menonjol, terlebih lagi karena sering di filmkan sebagai sosok yang antagonis dengan upaya paksa seperti: menangkap pelaku kejahatan, mengungkap perkara, mengatur arus lalu lintas, memberhentikan, menggeledah seseorang yang dicurigai sebagai penjahat atau berkaitan dengan kejahatan dan sebagainya (Dwilaksana, 2020).

Model pemolisian seperti itu akan lebih mengedepankan penggunaan kewenangan upaya paksa dan memerangi kejahatan. Kebutuhan keamanan dan rasan aman warga masyarakat sering kali ditandai dengan cara-cara reaktif, konvensional, walaupun di satu sisi mampu membangun citra polisi yang positif, namun di sisi lain dapat pula secara kuratif atau temporer. Berbagai hasil kajian tentang model pemolisian yang ditulis para Pakar Kepolisian seperti pada

buku Community Policing, karangan David Bayley dan Police for the future dalam Kunarto dikatakan bahwa model pemolisian yang reaktif dan mengedepankan penegakkan hukum serta memerangi kejahatan tidak menjamin, polisi mampu memberikan pelayanan keamanan dan membuat rasa aman warga yang dilayaninya. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa polisi tidak melakukan pencegahan (Kunarto, 1994).

Secara singkat *Art Policing* sebagai program dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan antara lain:

1. Memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya seni budaya dalam kehidupan polisi dan pemolisiannya. Membangkitkan ikon-ikon seni budaya dalam lingkungan polisi maupun tingkat komunitas agar mampu bergerak bersama atau turut dalam proses hidup tumbuh kembangnya seni budaya.
2. Pemolisian dapat dielaborasi dalam pendekatan religi, seni dan tradisi dengan berbagai festival yang dikemas dalam edukasi maupun tradisi-tradisi.
3. Gerak, nada, rupa, dan suara dijadikan bagian dari kegiatan yang dapat dilihat pada penampilan fisik, kinerja maupun gaya hidup sebagai ragam model pemolisian.
4. Tampilan-tampilan seni dalam ruang publik atau pada tempat-tempat layanan kepolisian.
5. Jurus pelipur lara atau penggeli hati untuk memecah kebuntuan atau kebosanan dalam kehidupan dan dalam komunikasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan pembinaan/pemahaman budaya melayani.
6. Aktif menggerakkan berbagai program masyarakat sadar wisata.
7. Memberdayakan media teknologi dan informasi sebagai penyambung hati.
8. Memberdayakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara langsung maupun melalui media, dan sebagainya (Dwilaksana, 2020).

3.3. Konsep Manajemen Konflik

Mengenai karakter penyebab konflik maka Bart Klem dalam Jamil (2007) mengklasifikasi berbagai faktor yang menopang konflik sebagai berikut:

1. Triger
Suatu peristiwa yang memicu dan dekat dengan terjadinya konflik, namun peristiwa tersebut tidak memadai untuk menjelaskan konflik bahkan kadang tidak diperlukan;
2. Pivotal factors
Penyebab utama terletak pada akar konflik (*root causes*) dimana faktor ini membutuhkan solusi untuk mengatasi konflik;
3. Mobilizing factors
Faktor yang memobilisasi atau aggravating factors yakni faktor yang memperburuk namun tidak cukup kuat sebagai penyebab konflik itu sendiri.

3.4. Konsep Manajemen Kolaboratif Sebagai Sarana Penanganan Konflik

Manajemen kolaboratif adalah kemitraan antara pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam pelayanan publik Agus Dwiyanto (2018). Dalam kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama berkerja mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat.

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) terdiri atas beberapa tahap yaitu :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa Desain Institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifar terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process) Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi

3.5. Efektivitas Kebijakan

Menurut Hutagalung dan Hermawan (2018) keberhasilan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal dengan melihat hasil dari indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ketepatan sasaran program bertujuan untuk melihat sejauhmana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari suatu program tersebut.

c. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program digunakan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan

Program Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya.

3.6. Teori Kekerasan Galtung

Thomas Hobbes berpendapat melalui temanya: homo homini lupus atau *man to man is an arrant wolfe* (manusia adalah srigala bagi srigala yang lain). Hanya saja menurut hobbes manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengkalkulasi kekerasan. Artinya, manusia menggunakan kekerasan untuk menghadapi kompetisi selfish dan pertandingan zero-

zum. Ada kepentingan pribadi yang harus dimenangkan melalui kekuatan atas kepentingan orang lain. Kesadaran inilah yang menyebabkan kekerasan menjadi pilihan untuk memenangkan pilihan (Novri, 2009).

Johan Galtung dalam Novri (2009) menciptakan tiga teori dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, langsung dan budaya.

1) Kekerasan struktural

Yang dimaksud dengan kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, menyalahgunakan sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. Artinya adalah penguasa yang mempunyai kekuasaan, menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan orang lain. Misalnya menggunakan kekuatan polisi sebagai sarana menyisihkan orang – orang yang dapat mengancam kepentingan pribadi penguasa. Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan setruktural (*structural violence*). Contohnya yang dialami oleh warga papua, kekayaan alam papua di eksploitasi besar – besaran, tetapi warga papua tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, pekerjaan yang layak, infrastruktur yang memadai dan rasa aman.

2) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka pada tubuh. Suatu kerusakan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap korban bisa dilakukan oleh individu, kelompok bahkan dalam bentuk ancaman.

Clinnard dan Quenney membedakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh individual (perorangan) dengan kekerasan yang dilakukan oleh kolektif (kelompok). Jenis jenis kekerasan secara individual adalah pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape), penganiayaan berat (aggravated assault), perampokan bersejata (armed robbery), penculikan (kidnapping). Sedangkan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (kelompok) adalah perkelahian masa, perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka – luka berat atau kematian.

3.7. Teori Kompetensi

Secara etimologi bahasa, istilah kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "competency" yang artinya kecakapan atau kemampuan (Echols, 1983).

Berikut penjelasan perkomponen dalam Teori Kompetensi Spencer dalam Dharma (2005):

- 1) Motives, yaitu konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.
- 2) Traits, yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
- 3) Self Concept, yaitu sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.
- 4) Knowledge, informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test, sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan.

5) Skills, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

4. Metode Penelitian

4.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, atas alasan bahwa dengan pendekatan kualitatif maka akan dapat dilakukan kontak secara langsung dengan informan yang ada di lokasi penelitian, selain itu karena penulis ingin melakukan interaksi secara langsung dilapangan, dengan mengamati, mencatat, bertanya, menggali data melalui sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi.

4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun mengenai lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Polres Bojonegoro sebagai Koordinator Pembina Bojonegoro Kampung Pesilat.

4.3. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2002).

Adapun yang menjadi sumber data primer yang menjadi rujukan untuk melakukan interview atau wawancara adalah :

1. Kasatreskrim Polres Bojonegoro
2. Kasatintellam Polres Bojonegoro
3. Kasat Binmas Polres Bojonegoro
4. Anggota Satreskrim Polres Bojonegoro
5. Anggota Satintellam Polres Bojonegoro
6. Ketua Bojonegoro Kampung Pesilat Wilayah Kalitudu
7. Ketua Bojonegoro Kampung Pesilat Wilayah Purwosari
8. Bhabinkamtibmas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro

4.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian (Hasan, 2002). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Wawancara, Observasi dan Telaah Dokumen

5. Pembahasan

5.1. Efektivitas Peran Bkp Dalam Mereduksi Konflik Horizontal Antar Perguruan Pencak Silat Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

5.1.1. Karakteristik Konflik Pencak Silat di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Konflik antar perguruan silat di Polres Bojonegoro tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor pemicu, faktor inti, faktor yang memobilisasi, dan faktor yang memperburuk. Faktor pemicu sering kali muncul sebelum dan sesudah acara besar seperti pengesahan anggota baru, kenaikan tingkat, atau syukuran. Pada momen-momen ini, terjadi pengumpulan massa besar dari Bojonegoro dan kabupaten sekitar, yang sering kali memicu salah paham atau provokasi kecil yang meledak menjadi konflik besar. Upaya antisipasi dilakukan melalui peningkatan pengamanan, patroli rutin, dan koordinasi dengan para sesepuh atau pimpinan perguruan silat untuk mencegah konflik. Edukasi tentang menjaga ketertiban dan saling menghormati antar perguruan juga terus dilakukan. Fokus pembinaan dan penyuluhan kepada anggota perguruan silat mengedepankan nilai sportivitas dan persaudaraan, sementara pendekatan persuasif mengingatkan mereka untuk tidak mudah terpancing provokasi. Kerjasama dengan ketua ranting perguruan penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada anggotanya. Dengan pendekatan yang tepat dan komunikasi yang baik, konflik

dapat dikurangi dan kedamaian di Bojonegoro dapat dijaga. Penyebab dasar atau faktor inti dari terjadinya konflik melibatkan beberapa aspek. Dominasi budaya menjadi salah satu faktor penting, di mana persaingan untuk mempertahankan eksistensi historis budaya perguruan silat sering kali memicu konflik. Konflik ini juga didorong oleh doktrin internal perguruan yang mengajarkan solidaritas dan intimidasi terhadap perguruan lain. Selain itu, persaingan sosial untuk mendominasi wilayah dan kekuasaan menjadi pemicu utama kekerasan antar perguruan. Dominasi dalam jaringan sosial oleh perguruan yang memiliki modal sosial kuat juga menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, memicu ketegangan dan konflik antar perguruan yang merasa terpinggirkan. Perbedaan identitas simbolis juga memainkan peran penting dalam memicu konflik, di mana fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok memperkuat antagonisme dan prasangka sosial. Siklus dendam yang dimulai dari ejekan atau masalah pribadi antar anggota di level grassroot juga sering kali berkembang menjadi konflik kelompok yang lebih besar. Faktor yang memobilisasi konflik termasuk konflik internal dalam perguruan silat itu sendiri, seperti yang terjadi pada perguruan silat PSHT yang terpecah menjadi PSHT 16 dan PSHT 17. Konflik internal ini dapat memicu perguruan untuk mengambil tindakan ofensif terhadap perguruan lain, seperti mencemarkan nama baik atau merusak fasilitas. Faktor-faktor yang memperburuk konflik meliputi ketidaktahuan atau kurangnya informasi mengenai perguruan silat yang berkonflik, serta adu argumen di media sosial yang memanaskan suasana. Intimidasi atau ancaman dari salah satu pihak juga memperparah ketegangan. Selain itu, dukungan atau intervensi dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab dapat memicu eskalasi konflik dan menambah kompleksitas situasi.

5.1.2. Efektivitas Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam Rangka Mewujudkan Situasi yang Kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro

Proses kolaboratif dalam Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) melibatkan beberapa elemen penting pertama trust building yang merupakan elemen kunci dalam manajemen kolaboratif, terutama mengingat sejarah persaingan antar perguruan silat di BKP. Kepercayaan dibangun melalui dialog terbuka dan transparan, konsistensi tindakan, serta penghargaan terhadap nilai dan budaya masing-masing perguruan. Penyelesaian konflik secara konstruktif juga berperan penting dalam membangun kepercayaan. Dalam konteks BKP, trust building menciptakan kerjasama yang harmonis dan efektif. Kedua, Komitmen terhadap proses adalah elemen esensial yang mencerminkan dedikasi dan kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi penuh dalam semua tahapan kolaborasi. Dalam BKP, komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran aktif dalam berbagai kegiatan dan implementasi keputusan yang disepakati. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan menunjukkan upaya untuk memperkuat kapasitas anggota BKP dan meningkatkan kerjasama antara Polres Bojonegoro dan berbagai perguruan silat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga, Shared understanding adalah elemen krusial yang memastikan semua pihak memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama mengenai tujuan, proses, dan nilai-nilai kolaborasi. Dalam konteks BKP, shared understanding membantu menciptakan kerjasama yang lebih efektif, mengurangi konflik, dan mencapai tujuan bersama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bojonegoro. Keempat, Intermediate outcomes. Adapun Intermediate outcomes dari proses kolaboratif dalam BKP menunjukkan peran penting BKP dalam mencegah konflik yang lebih besar melalui upaya kolaboratif yang meningkatkan kerukunan antar komunitas dan mengurangi risiko kerusakan. Implementasi manajemen kolaboratif membantu menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kebijakan kepolisian dengan efektif. BKP juga berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial dan kebudayaan, serta mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memperkuat jaringan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berdaya.

Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) adalah inisiatif penting untuk menjaga perdamaian di masyarakat. Meskipun telah memberikan banyak manfaat, BKP menghadapi berbagai kendala operasional. Ketiadaan alokasi anggaran khusus menjadi salah satu hambatan besar, yang mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan program-program yang memadai dan berkelanjutan. Dana yang terbatas juga berdampak pada kemampuan BKP untuk membayar honor pelatih, membeli logistik, dan mengadakan kompetisi pencak silat. Selain itu, tidak semua anggota masyarakat menyadari pentingnya BKP, sehingga partisipasi rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan promosi yang efektif. BKP juga menghadapi resistensi antar perguruan yang sering kali terjadi akibat persaingan dan perbedaan ideologi. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat pelatihan di luar topik pencak silat, seperti pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha. Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi tantangan, termasuk kurangnya tempat latihan yang representatif dan peralatan yang memadai. Mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya perdamaian dan menghargai perbedaan juga merupakan tantangan besar, karena banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama. Koordinasi yang kurang efektif antara BKP dengan pemerintah daerah dan lembaga lain juga menghambat pelaksanaan program-programnya. Selain itu, kurangnya penelitian dan evaluasi terhadap program-program BKP mengurangi efektivitasnya. Untuk mengatasi kendala ini, BKP perlu memperbaiki fasilitas, mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif, dan mencari kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan sumber daya dan dukungan.

Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) terbukti efektif dalam mengurangi konflik antarperguruan silat, ditunjukkan oleh penurunan jumlah insiden dari 15-20 menjadi 3-5 per tahun. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan. Di satu sisi, program ini tepat sasaran dan berhasil dalam pencapaian tujuan utamanya, namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan peran Bhabinkamtibmas. Pengawasan dan dukungan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.

5.2. Optimalisasi Peran Bkp Dalam Mereduksi Konflik Horizontal Antar Perguruan Pencak Silat Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

5.2.1. Optimalisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sebagai Jenis Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan Konsep *Art Policing*

Optimalisasi implementasi program BKP yang mengadopsi konsep *Art Policing* melalui seni dan budaya bertujuan tidak hanya untuk mengurangi konflik tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan di antara berbagai perguruan pencak silat. Pendekatan ini menawarkan cara baru dalam menangani konflik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi. Salah satu implementasi utama adalah dengan mengadakan festival seni dan budaya yang melibatkan polisi dan komunitas, seperti Festival Budaya dan Silat, yang mempertemukan berbagai perguruan untuk berkolaborasi dalam pertunjukan seni bela diri. Selain itu, BKP juga memainkan peran penting dalam acara keagamaan seperti "Bojonegoro Bersholawat bersama Habib Syech" dan "Festival Ngelenyer Dance," di mana mereka mengintegrasikan elemen seni bela diri dengan tradisi keagamaan dan seni tari, menciptakan harmoni antara budaya dan agama. BKP juga terlibat dalam pelatihan kepemimpinan dan festival kolaborasi seni bela diri dan tari, yang bertujuan untuk membekali pemimpin perguruan dengan keterampilan mediasi konflik dan mempromosikan kolaborasi kreatif antar komunitas. Dalam ranah publik, BKP aktif berpartisipasi dalam Pawai Budaya dan Jamasan Waranggono, mengintegrasikan seni dan tradisi lokal untuk meningkatkan interaksi positif antara polisi dan masyarakat, serta memperkuat peran kepolisian sebagai bagian integral dari promosi budaya. Selain itu, keterlibatan BKP dalam acara seperti

Bojonegoro Night Carnival juga menonjolkan peran seni bela diri dalam menghilangkan ketegangan dan memperkuat komunikasi di antara komunitas. BKP juga aktif dalam kegiatan sosial dan bakti sosial yang melibatkan perguruan pencak silat serta komunitas lokal, dengan fokus pada pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya lokal. Mereka mengorganisir kegiatan seperti pembersihan lingkungan dan kampanye kesehatan, yang tidak hanya mempromosikan seni bela diri tetapi juga memperkuat kerjasama dan hubungan antara perguruan pencak silat, masyarakat, dan pihak kepolisian. Dalam semua kegiatan ini, BKP memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk mempromosikan kegiatan seni dan budaya, memperkuat citra positif pencak silat, dan mendorong nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan filosofi pencak silat. Untuk memaksimalkan Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dengan pendekatan Art Policing dan mengurangi konflik antar perguruan pencak silat, diperlukan beberapa langkah penting. Tahap awal mencakup perencanaan dan persiapan, yang melibatkan evaluasi kebutuhan komunitas dan pembuatan rencana strategis. Koordinasi dengan berbagai stakeholder, seperti Disbudpar, IPSI, sekolah, dan komunitas seni, juga menjadi kunci dalam memastikan dukungan dan kelancaran pelaksanaan program. Selanjutnya, pengembangan program meliputi pelaksanaan workshop dan pelatihan kepemimpinan bagi pemimpin perguruan pencak silat, serta penyelenggaraan festival budaya dan kegiatan sosial yang bertujuan membangun kebersamaan. Pelaksanaan kegiatan harus didukung oleh promosi yang efektif dan eksekusi acara yang aman dan sesuai dengan rencana. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan umpan balik yang berguna untuk peningkatan program. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan berkelanjutan, yang kemudian didokumentasikan dalam laporan akhir. Terakhir, peningkatan kapasitas semua pihak yang terlibat dalam program dilakukan melalui pelatihan tambahan dan pengembangan jaringan kerjasama untuk memperluas jangkauan dan dampak program BKP.

5.2.2. Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP)

Peran Bhabinkamtibmas dalam BKP adalah sangat vital dan mencakup berbagai aspek yang dapat dijelaskan melalui lima indikator kompetensi dari Spencer dan Spencer, yaitu motivasi, konsep diri, pengetahuan, keterampilan, dan tantangan yang dihadapi. Bhabinkamtibmas termotivasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta mempromosikan kebudayaan lokal melalui seni bela diri tradisional. Konsep diri yang kuat sebagai pembina dan pelindung masyarakat serta penjaga warisan budaya membantu mereka menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab moral dan kebanggaan. Pengetahuan mendalam tentang seni bela diri, manajemen program, serta strategi pencegahan kejahatan dan keamanan menjadi landasan penting dalam melaksanakan program BKP. Keterampilan praktis dalam seni bela diri, komunikasi, dan manajemen program memungkinkan mereka mengajar, melatih, dan mengorganisir kegiatan dengan efektif. Meskipun demikian, mereka juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat, yang memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak dan edukasi masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah-langkah nyata untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) mencakup berbagai tahap dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pada jangka pendek (1-6 bulan), fokus utama adalah pada pelatihan dasar dan edukasi, termasuk pemahaman mendalam tentang sejarah pencak silat dan tujuan BKP. Identifikasi kelompok sasaran, perencanaan jadwal dan lokasi kegiatan, serta kampanye sosial juga dilakukan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat. Pada jangka menengah (6-12 bulan), Bhabinkamtibmas diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan lanjutan melalui pelatihan yang lebih kompleks, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Evaluasi awal dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan menentukan area yang perlu

diperbaiki. Pada jangka panjang (1-3 tahun), pengembangan infrastruktur dan sumber daya, termasuk penyediaan fasilitas latihan dan penambahan tenaga ahli, menjadi prioritas. Program keberlanjutan juga dikembangkan untuk melatih generasi baru dan memastikan kelangsungan program. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai dampak BKP terhadap masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan program lebih lanjut. Pengakuan dan penghargaan bagi Bhabinkamtibmas yang berprestasi juga diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

5.2.3. Optimalisasi Anggaran Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP)

Optimalisasi anggaran dalam Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengelolaan anggaran yang tepat akan mendukung keberlanjutan program dan memaksimalkan hasil dalam membangun karakter, disiplin, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Beberapa strategi yang digunakan meliputi inklusi BKP dalam DIPA Polres Bojonegoro, pengembangan kerjasama dengan lembaga donor, memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, optimalisasi penggunaan sumber daya internal, dan pemanfaatan teknologi serta media sosial. Inklusi BKP dalam DIPA Polres Bojonegoro mencakup identifikasi kebutuhan anggaran, penyusunan proposal, serta persetujuan dan alokasi anggaran. Pengembangan kerjasama dengan lembaga donor melibatkan penelitian donor potensial, pengajuan proposal, dan memperkuat relasi dengan donor. Kerjasama dengan pemerintah daerah berfokus pada advokasi, integrasi BKP ke dalam rencana kerja daerah, dan pemanfaatan dana APBD. Optimalisasi sumber daya internal mencakup peningkatan efisiensi operasional dan pelibatan komunitas, sedangkan pemanfaatan teknologi dan media sosial digunakan untuk promosi, edukasi, dan penggalangan dana online. Semua strategi ini bertujuan untuk memastikan program BKP berjalan dengan dukungan finansial yang cukup, meningkatkan kapasitas lokal, dan memberdayakan komunitas.

5.2.4. Optimalisasi Pengawasan Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP)

Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengawasan ini melibatkan mekanisme internal dan eksternal serta partisipasi aktif dari berbagai stakeholder. Pengawasan internal mencakup pembentukan komite pengawas yang terdiri dari anggota berbagai departemen terkait, penunjukan koordinator program di setiap desa, laporan bulanan, rapat evaluasi berkala, kunjungan lapangan, dan penggunaan teknologi seperti sistem informasi manajemen dan aplikasi mobile. Pengawasan eksternal melibatkan audit independen, evaluasi oleh akademisi, partisipasi masyarakat melalui forum dan survei kepuasan, serta kolaborasi dengan media lokal dan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Stakeholder yang terlibat dalam pengawasan ini termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan LSM, serta pihak swasta yang berperan dalam mendukung dan memantau pelaksanaan program.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Efektivitas Program Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mereduksi konflik horizontal antarperguruan pencak silat di wilayah Hukum Polres Bojonegoro terbukti cukup signifikan, dengan penurunan insiden konflik dari 15-20 menjadi 3-5 per tahun. Konflik antar perguruan silat di wilayah ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti dominasi budaya, persaingan sosial, perbedaan identitas simbolis, dan siklus dendam. Faktor-faktor ini diperparah oleh mobilisasi konflik internal antar perguruan, kurangnya informasi yang akurat, dan provokasi di media sosial. Program BKP berhasil menargetkan akar permasalahan melalui manajemen kolaboratif yang mencakup trust building, komitmen, shared understanding, dan intermediate outcomes, yang membantu mengurangi konflik dan menjaga stabilitas wilayah. Namun, meski BKP efektif dalam mencapai tujuan utamanya, masih terdapat beberapa aspek

yang memerlukan peningkatan, seperti sosialisasi, pelibatan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas, serta pengawasan dan dukungan anggaran. Optimalisasi peran BKP dapat dilakukan dengan memperbaiki koordinasi antar stakeholder, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan dukungan anggaran yang memadai untuk keberlanjutan program.

Optimalisasi peran Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mereduksi konflik horizontal antar perguruan pencak silat di wilayah Hukum Polres Bojonegoro memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Program BKP yang mengadopsi konsep Art Policing melalui seni dan budaya, bukan hanya berfokus pada pengurangan konflik, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan di antara perguruan pencak silat. Dengan mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti festival, acara keagamaan, dan pelatihan kepemimpinan, BKP mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, rekonsiliasi, dan kolaborasi antar perguruan. Optimalisasi ini juga melibatkan peran penting Bhabinkamtibmas, yang melalui pelatihan dan edukasi bertahap, dapat menjadi motor penggerak program BKP di lapangan. Dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan yang efektif juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. Dengan strategi yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, BKP dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Bojonegoro.

6.2. Saran

Untuk anggota pesilat yang tergabung di pengurusan BKP, penting untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh perguruan silat yang ada, terutama dalam upaya trust building dan shared understanding. Melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka, anggota dapat lebih memahami isu-isu yang menjadi pemicu konflik dan merumuskan solusi bersama yang berkelanjutan. Selain itu, anggota harus proaktif dalam menyosialisasikan program BKP kepada komunitas, sehingga masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah Bojonegoro.

Untuk Kapolres Bojonegoro dan para stakeholder lainnya, disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program-program BKP, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Dukungan ini termasuk peningkatan peran Bhabinkamtibmas melalui pelatihan lanjutan dan pemberian fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi program secara berkala guna memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, BKP dapat menjadi model yang efektif dalam mereduksi konflik dan memperkuat harmoni sosial di Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1991
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Bachtiar, Harsya W. *Ilmu Kepolisian, Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Grasindo, 1994
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Dahniel, Rycko Amelza, *Ilmu Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, 2015
- Djoemali, Ki Moh., *Pencak Silat dan Seni Budaya*, Kementerian P & K, Yogyakarta, 1985.
- Dwilaksana, Chryshnanda. (2020), *Art Policing, Pemolisian Dengan Pendekatan Seni Budaya*, YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian), Jakarta
- Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, UGM Press, Yogyakarta, 2018
- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak (edisi bahasa Indonesia)*, The British Council, Indonesia, Jakarta, 2010
- Galtung, J. *Peace By Peaceful Means*. SAGE Publications, London, 1996
- Goldstein, Herman, *Problem Oriented Policing*, McGraw-Hill dan Temple University Press, 1990
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2004
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002
- Kunarto, *Penyimpangan Polisi*, 1994, Cipta Manunggal.
- Long, Thomas Hil. *Collins English Dictonary*, London, 1979
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2005
- Mulyapradana, Aria. *Towards Optimization, Creativity and Agility*, CV. Diandra Primamitra, Yogyakarta, 2021
- Novri, Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontenporer*, Jakarta, 2009
- Ruslan, Rosidy. *Metode Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, *Ilmu Kepolisian (Edisi Perdana Dies Natalis STIK-PTIK ke-69)*. PTIK Press, Jakarta, 2015
- Suparlan, Parsudi, *Masyarakat : Struktur Sosial, Manusia Indonesia, Individu, keluarga dan Masyarakat*, editor: A. Wdjaja, Akademika Presindo, Jakarta, 1986
- Suparlan, Parsudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pusat Kajian Amerika PPs Universitas Indonesia, Jakarta, 1996

Jurnal

- Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, JPART 18:543- 571, Oxford University, 2007
- Dahniel, Rycko Amelza "Membangun Karakter Bangsa Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif dari Perspektif Ilmu Kepolisian", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 084, September 2015
- Fauziyah. Nur., "Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Disabilitas", Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2015
- Hidayat et al., "Pencak Silat Sebagai Upaya Melestarikan Olahraga Asli Indonesia Dan Mewujudkan Prestasi Anak Pada Usia Dini Di Upt Pendidikan" *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Tasikmalaya, 2018

- Jatmiko, Gunawan. “Konstruksi Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Community Policing”, *Laporan Akhir Penelitian Unggulan Universitas Lampung*, 2022
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright protection of art containing nudist elements under positive law in Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Sinaga, mula. “Deteksi Dini Konflik Antar Budaya Deputy Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Proyek Pelestarian Pengembangan Tradisi Dan Kepercayaan” , *Kemendikbud, Jakarta*, 2003
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Kurniawan, F., Salsabila, S. M., & Kholiq, M. N. (2024). Legal Framework and Employee Liability in Banking Compliance and Crime Prevention: The Case Analysis of Indonesia. *Yustisia*, 13(3), 298-312.
- Thalib, P., Salsabila, S. M., & Rahadi, A. P. (2024). Violation of the Prudential Principle in Cooperative Credit Granting. In *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* (Vol. 4, No. 1, p. 15). Research Synergy Foundation.
- Yulianto, Joni Eko. “Anak, Identitas Nasional, dan Pendidikan Multikulturalisme”, *Jurnal Universitas Ciputra Surabaya*, Oktober 2018